

RENCANA AKSI TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET						
					I	II	III	IV			
Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			-	-	-	76,52			
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			-	-	-	85			
		Angka Kriminalitas			-	-	-	25,56			
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			-	-	-	79,50			
NO.	KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	Upacara Hari Kebangkitan Nasional	-	✓	-	-
							Upacara Hari Kesaktian Pancasila	-	-	✓	-
							Upacara Hari Lahir Pancasila	-	✓	-	-
				Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	✓	✓	✓	-
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Pendidikan Politik oleh Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	100%	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35 Orang	BANPOL - Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	✓	✓	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32 Orang	Kajian Akademis Kenaikan bantuan Keuangan Partai Politik	✓	-	-	-
							Konsultasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	-	✓	-	-

NO.	KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
3.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	Hibah Uang Organisasi Kemasyarakatan	-	-	✓	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	Honorarium Tim Pelaksana Satuan Tugas Terpadu Penanganan Dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme Yang Mengganggu Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi Di Kabupaten Ponorogo	✓	✓	✓	✓
4	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	100%	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Orang	Hibah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	-	✓	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	70 Orang	Honorarium Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN)	✓	✓	✓	✓
							Konsultasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	-	-	✓	-

NO.	KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
5.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kegiatan Kondusivitas Keamanan, Ketertiban Di Wilayah Dan Ketahanan Nasional	100%	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Orang	Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat - POLRES	-	✓	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini	-	-	✓	-
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	✓	✓	✓	✓



Ponorogo, 19 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo

[Signature]
Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP 196805121990092002